

konteks, menunjukkan bagaimana kekuatan rakyat dapat menjadi instrumen perubahan yang dahsyat.



Kumpeni Belanda: Penjajah yang Terlalu Lama Berkuasa

Ketika Belanda datang ke Nusantara, awalnya mereka hanya berniat berdagang. Namun, ambisi mereka tumbuh menjadi penjajahan yang berlangsung selama lebih dari tiga abad. **Kumpeni Belanda**, melalui VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie), bukan hanya sekadar menguasai perdagangan, tetapi juga mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia Indonesia. Berbagai kebijakan seperti "tanam paksa (Cultuurstelsel)" dan monopoli perdagangan telah menyengsarakan rakyat.

Rakyat yang merasa dijajah secara ekonomi dan politik tidak tinggal diam. Perlawanan muncul di berbagai daerah, dari Perang Diponegoro, Perang Aceh, hingga perjuangan tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno dan Hatta. Perlawanan ini semakin terorganisasi pada awal abad ke-20, ketika kesadaran nasionalisme mulai tumbuh. Puncaknya adalah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, yang menandai tumbanginya dominasi Belanda, meskipun mereka masih berupaya kembali melalui agresi militer.



Orde Baru: Penjajahan dalam Bentuk Berbeda

Setelah kemerdekaan, rakyat [Indonesia](#) kembali menghadapi bentuk “penjajahan” baru, kali ini oleh bangsanya sendiri. Rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto memerintah dengan tangan besi selama lebih dari tiga dekade. Stabilitas politik dan ekonomi yang dicanangkan rezim ini dibayar mahal dengan hilangnya kebebasan demokrasi.

Kritik dibungkam, oposisi dihabisi, dan kebebasan pers diberangus. Di balik pembangunan ekonomi yang digadang-gadang, korupsi, kolusi, dan nepotisme merajalela. Rakyat, terutama kelompok-kelompok kecil dan lemah, merasa tertindas oleh kebijakan yang lebih menguntungkan elit.

Kemarahan rakyat mencapai puncaknya ketika krisis moneter 1997-1998 melanda [Indonesia](#). Harga-harga melambung, pengangguran meningkat, dan rasa frustrasi memuncak. Demonstrasi besar-besaran yang dipimpin oleh mahasiswa menjadi simbol perlawanan rakyat. Pada akhirnya, tekanan dari seluruh penjuru memaksa Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, menandai runtuhnya Orde Baru.

Kesamaan dalam Perlawanan

Meskipun era kolonial Belanda dan Orde Baru memiliki perbedaan konteks, ada kesamaan mencolok dalam pola perlawanan rakyat. Keduanya dipicu oleh ketidakpuasan terhadap ketidakadilan dan penindasan yang dirasakan. Baik penjajahan Belanda maupun pemerintahan Orde Baru gagal memahami bahwa kekuatan rakyat tidak bisa diremehkan.

Perlawanan rakyat, baik di masa penjajahan maupun di era modern, juga menunjukkan bahwa rakyat memiliki batas kesabaran. Ketika tekanan melampaui batas, gelombang perlawanan menjadi tak terelakkan. Gerakan ini sering kali dipimpin oleh kelompok intelektual, pemuda, atau tokoh masyarakat yang memahami bagaimana menyuarakan penderitaan rakyat.

Pelajaran yang Dapat Dipetik

Kisah tumbangnya Kumpeni Belanda dan Orde Baru adalah pengingat bahwa kekuasaan tidak bisa bertahan selamanya tanpa keadilan. Sebuah pemerintahan atau kekuasaan yang tidak mendengarkan aspirasi rakyatnya, bahkan menindas mereka, akan menemui akhirnya.

Bagi generasi saat ini, sejarah ini juga menjadi refleksi bahwa kebebasan dan demokrasi yang kini dinikmati bukanlah sesuatu yang diberikan begitu saja. Kebebasan ini adalah hasil dari perjuangan panjang yang penuh pengorbanan. Oleh karena itu, penting bagi rakyat Indonesia untuk terus menjaga semangat kebangsaan dan memastikan bahwa setiap pemimpin yang terpilih menjalankan kekuasaan dengan adil, transparan, dan berpihak pada rakyat.

Baik penjajahan Belanda maupun pemerintahan Orde Baru menunjukkan bahwa rasa ketidakadilan dapat menjadi api yang membakar semangat perlawanan rakyat. Ketika rakyat merasa dijajah, mereka tidak akan tinggal diam. Sejarah membuktikan bahwa rakyat Indonesia adalah bangsa yang berdaulat, yang mampu menggulingkan siapa saja yang mencoba menindas mereka. Maka, mari terus belajar dari sejarah dan menjaga agar semangat kemerdekaan dan keadilan tetap hidup dalam setiap langkah bangsa.

Jakarta, 28 Januari 2025

Hendri Kampai

Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia/JNI/Akademisi